



## PEMBERDAYAAN POLITIK PEMILIH MUDA DI DESA SESETAN MENUJU PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Anastacia Patricia Novlina Nurak\*, Bayu Adhinata, Chintiya Meydayanti Wijaya

Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Indonesia

\*Penulis Korespondensi, email: [anastacia.novlina@warmadewa.ac.id](mailto:anastacia.novlina@warmadewa.ac.id)

Received: 30/08/2024

Revised: 11/11/2024

Accepted: 14/11/2024

**Abstract.** *The political empowerment program aims to increase public awareness of politics, particularly for first-time voters in the 2024 simultaneous regional elections in Sesetan village, South Denpasar district, Bali province. Political empowerment focuses on efforts carried out by those with access, to information, and the capability to formulate policies for others who must be involved in the implementation of those policies. Political education is the key to empowering young voters, particularly those belonging to Generation Z (Gen Z). The method used in this community service involves several stages, consisting of three phases: preparation, implementation, and evaluation. The preparation phase includes problem identification, determination of empowerment targets, coordination with internship partners, and implementation planning. The implementation phase involves pre-test data collection, the execution of political empowerment activities, and post-test data collection following the political empowerment. The evaluation phase includes activity evaluation based on the pre-test and post-test results, the development of frameworks suitable for the empowerment targets, and the preparation of output frameworks to be provided to partners capable of implementing these frameworks. Two main issues were identified: the low awareness of participating in electoral activities such as becoming election supervisors, and the lack of political knowledge about distinguishing political hoaxes related to elections. The findings revealed that the low participation awareness is due to the lack of exposure to informal political education outside of formal education, as well as the minimal literacy education on how to utilise gadgets to select reliable sources of political information.*

**Keywords:** *political education, young voters, political participation, election hoaxes*

**Abstrak.** Program pemberdayaan politik bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai politik, khususnya pemilih pemula pada pilkada serentak tahun 2024 di desa Sesetan, kecamatan Denpasar Selatan, provinsi Bali. Pemberdayaan politik berpusat pada upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki akses dan informasi serta kemampuan, agar menghasilkan kebijakan tepat guna terutama dengan melibatkan pihak-pihak yang seharusnya. Pendidikan politik merupakan kunci utama dalam memberdayakan pemilih muda yang termasuk dalam Generasi Z (Gen Z). Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa tahapan yang terdiri dari tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan terdiri dari identifikasi masalah dan penentuan target pemberdayaan, koordinasi bersama mitra magang dan perencanaan pelaksanaan. Sementara itu, tahap pelaksanaan terdiri dari pengambilan data pre-test, pelaksanaan pemberdayaan politik, dan pengambilan data post test paska pemberdayaan politik. Tahap evaluasi terdiri dari evaluasi kegiatan berdasarkan hasil pre test dan post test dan penyusunan frameworks yang cocok dengan target pemberdayaan, penyusunan output frameworks akan diberikan pada pihak mitra yang mampu mengimplementasikan kerangka tersebut. Terdapat dua permasalahan utama yang teridentifikasi yakni rendahnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepemiluan seperti menjadi pengawas pemilu dan minimnya pengetahuan politik tentang membedakan hoaks politik yang berkaitan dengan pemilu. Hasil yang ditemukan bahwa rendahnya kesadaran berpartisipasi dikarenakan kurangnya paparan pendidikan politik informal diluar pendidikan formal serta minimnya pendidikan literasi tentang memanfaatkan *gadget* untuk memilih sumber informasi politik yang terpercaya.

**Kata Kunci:** pendidikan politik, pemilih muda, partisipasi politik, hoaks pemilu

How to Cite: Nurak, A. P. N., Adhinata, B. & Wijaya, C. M. (2024). PEMBERDAYAAN POLITIK PEMILIH MUDA DI DESA SESETAN MENUJU PILKADA SERENTAK TAHUN 2024. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3) 346-353. doi: <https://doi.org/10.37478/mahajana.v5i3.4679>

### PENDAHULUAN

Negara yang menganut sistem demokrasi tentunya akan melaksanakan pemilihan umum sebagai persyaratan awal berlangsungnya nilai-nilai demokratis (Fikri, et. al., 2022). Pemilu, terlebih lagi pemilihan kepala daerah diharapkan mampu mencerminkan nilai demokratis tersebut, terutama dari tingkat pemerintahan daerah. Selain itu, pemilihan umum berfungsi sebagai sarana legitimasi politik kepada pemimpin yang terpilih (Akhmad, Thamrin & Santosa,



2023). Pada pemilihan kepala daerah terjadi mekanisme pergantian kekuasaan atau sirkulasi elit sehingga diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk merespon pelaksanaan pilkada serentak 2024 ini. Kegiatan pengabdian masyarakat terutama melalui pemberdayaan politik menjadi sarana pendidikan dan sosialisasi politik yang bersifat massal dan periodik. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan juga menghormati hasil pemilu, namun pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya (Sima & Kusuma, 2024). Permasalahan utama yaitu sebaran dan juga pemberian informasi kepada masyarakat mengenai proses-proses yang utama dalam pemilihan kepala daerah serta bentuk partisipasi politik yang bisa dilakukan oleh pemilih muda (Kompas, 2019). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi dan kondisi politik di Indonesia, khususnya di Bali. Program pemberdayaan politik bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai politik, khususnya pemilih pemula pada pilkada serentak tahun 2024 di desa Sesetan, kecamatan Denpasar Selatan, provinsi Bali. Pemberdayaan politik berpusat pada upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki akses dan informasi serta kemampuan menghasilkan kebijakan kepada pihak lain yang harus terlibat dalam penerapan kebijakan tersebut (Dommet & Temple, 2018). Pemberdayaan adalah perspektif pekerjaan sosial yang digunakan untuk mengatasi perbedaan kekuasaan, dalam rangka meningkatkan fungsi individu dan masyarakat serta mempromosikan keadilan sosial (Gutierrez, 1995). Pada dasarnya, pemberdayaan tidak dapat dipahami tanpa mengakui bahwa pribadi adalah politis, peran kekuasaan dalam hubungan sosial, dan bahwa kekuasaan dihasilkan melalui interaksi sosial. Pemberdayaan politik pada pemilih muda di Indonesia menjadi isu penting dalam pembangunan demokrasi di negara ini (Haryani & Hadi, 2021).

Mengingat demografi yang mayoritas diisi oleh kaum muda, pemilih muda memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil pemilihan dan arah kebijakan politik. Pemilih muda sendiri memiliki porsi yang paling besar dalam pemilihan serentak tahun 2024 ini dengan mengisi lebih dari 55% daftar pemilih tetap dan tergolong fasih menggunakan internet karena Indonesia masuk dalam negara dengan pengguna internet terbesar pada tahun 2016 (Pratama, 2017). Oleh karena itu, pemberdayaan politik pemilih muda tidak hanya penting untuk memastikan partisipasi mereka dalam proses demokrasi, tetapi juga untuk membentuk masa depan politik yang inklusif dan representatif. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kesadaran dan minat di kalangan pemuda Indonesia terhadap isu-isu politik dan kebijakan publik. Pemilih muda sering kali menjadi target utama dalam kampanye politik, mengingat mereka adalah kelompok demografi yang besar dan dinamis (Rogers & D., 1987).

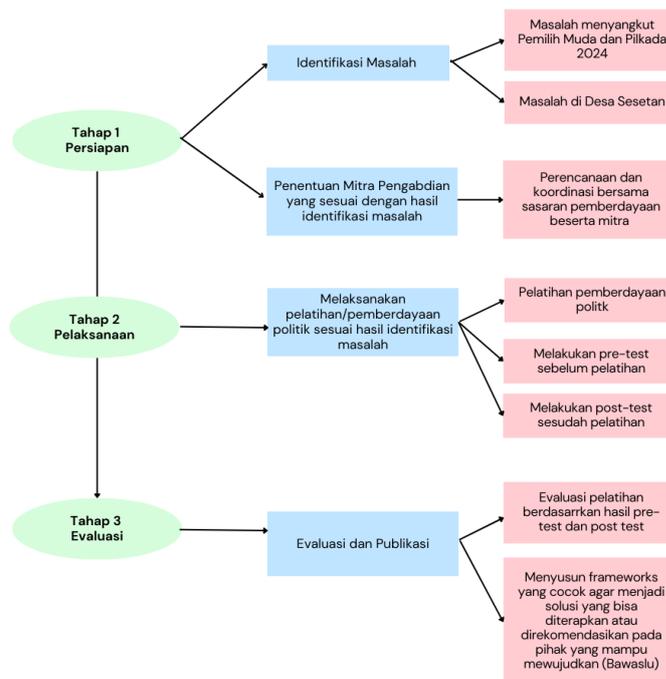
Namun, tantangan utama dalam pemberdayaan politik pemilih muda adalah apati politik dan kurangnya informasi. Banyak pemuda merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik dan merasa skeptis terhadap politisi serta proses politik itu sendiri. Pendidikan politik merupakan kunci utama dalam memberdayakan pemilih muda. Gutierrez (1995) mengkonseptualisasikan pemberdayaan sebagai sebuah proses linier, yang membutuhkan empat sub-proses psikologis: rasa percaya diri, pengembangan kesadaran kritis, perolehan keterampilan, dan keterlibatan dengan orang lain yang serupa. Kurikulum pendidikan formal yang mencakup pendidikan kewarganegaraan dan politik dapat membantu pemuda memahami sistem politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta cara mereka dapat terlibat dalam proses demokrasi (Potter, *Argument for the Need for a Cognitive Theory of Media Literacy*, 2004).

Selain pendidikan formal, program-program pendidikan non-formal seperti workshop, seminar, dan diskusi publik juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi politik di kalangan pemuda (Potter, *Media Literacy second edition*, 2001). Secara khusus perkembangan teknologi, terutama media sosial, telah menjadi alat penting dalam pemberdayaan politik pemilih muda. Media sosial memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan cepat, serta memberikan platform bagi pemuda untuk menyuarakan pendapat mereka (Matthes, 2022). Kampanye politik dan gerakan sosial kini sering kali dimulai dan didorong oleh aktivitas di media sosial, yang memungkinkan pemuda untuk berpartisipasi secara aktif tanpa hambatan geografis. Namun, tantangan yang muncul adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks, yang dapat membingungkan pemilih muda dan menurunkan kualitas partisipasi mereka (Yates, 2016).

Sasaran pengabdian ini adalah pemuda - pemudi yang termasuk dalam pemilih muda di desa Sesetan, kecamatan Denpasar Selatan provinsi Bali. Desa atau kelurahan Sesetan merupakan salah satu dari enam kelurahan di Denpasar Selatan yang berbatasan langsung dengan Desa Dauh Puri Kelod di sebelah utara dan berbatasan dengan Selat Badung di sebelah selatan. Sementara di sebelah timur, bertetangga dengan Desa/Kelurahan Sidakarya dan Desa/Kelurahan Pedungan di sebelah barat. Luas wilayah Desa Sesetan kurang lebih 7,39 km<sup>2</sup> dan merupakan wilayah terluas ketiga di Kecamatan Denpasar Selatan (BPS RI, 2023). Berbagai inisiatif dan gerakan yang dipimpin oleh pemuda telah muncul untuk mendorong partisipasi politik yang lebih besar (Telaumbanua, 2023). Organisasi-organisasi pemuda dan komunitas-komunitas diskusi politik telah bermunculan di berbagai daerah, menawarkan ruang bagi pemuda untuk berdiskusi, belajar, dan berpartisipasi dalam proses politik. Inisiatif seperti "Pemilih Cerdas" dan "Suara Millenial" bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada pemilih muda, serta menginspirasi mereka untuk menjadi pemilih yang kritis dan bertanggung jawab (Tim Riset Bawaslu RI, 2017). Dalam kesimpulannya, pemberdayaan politik pada pemilih muda di Indonesia merupakan upaya yang kompleks namun esensial untuk memperkuat demokrasi di negara ini (Giyandri & Sinaga, 2024). Dengan meningkatkan literasi politik, memanfaatkan teknologi, mendukung inisiatif pemuda, dan melibatkan berbagai pihak dalam proses ini, diharapkan partisipasi politik pemilih muda akan semakin meningkat dan berdampak positif pada masa depan politik Indonesia (Rista & Wiranata, 2024).

## METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa tahapan yang terdiri dari tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan terdiri dari identifikasi masalah dan penentuan target pemberdayaan, koordinasi bersama mitra magang dan perencanaan pelaksanaan. Sementara itu, tahap pelaksanaan terdiri dari pengambilan data pre-test, pelaksanaan pemberdayaan politik, dan pengambilan data post test paska pemberdayaan politik. Tahap evaluasi terdiri dari evaluasi kegiatan berdasarkan hasil pre test dan post test dan penyusunan *frameworks* yang cocok dengan target pemberdayaan, penyusunan output frameworks akan diberikan pada pihak mitra yang mampu mengimplementasikan kerangka tersebut.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan politik di Desa Sesetan

Subjek penelitian yang melakukan pre-test dan post test dalam pemberdayaan politik ini adalah mereka yang hadir dalam pemberdayaan politik pemilih muda di Sesetan. Terdapat 25 orang peserta yang berusia 17 – 24 tahun. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Generasi *Z'ers'* atau sering disebut Gen z adalah mereka yang berusia 18-23 tahun atau lahir pada tahun diatas 1997 hingga 2012 (Parker & Igielnik, 2020). Hal ini yang menjadi landasan peneliti untuk mengelompokkan pemilih muda yang berusia 18-23 tahun sebagai responden pemilih muda yang menjadi peserta pemberdayaan masyarakat ini. Sehingga, pemilih muda dalam pengabdian ini merujuk pada peserta berusia 17-24 tahun yang sudah memiliki hak memilih pada pemilihan umum serentak tahun 2024 ini. Peserta pemberdayaan ini merupakan penduduk yang berdomisili resmi serta bertempat tinggal di Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar lebih dari 10 tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pertama, masalah yang teridentifikasi di Kelurahan Sesetan meliputi kurangnya kesadaran pemuda pemudi untuk berpartisipasi politik seperti terlibat dalam pendaftaran pengawas pemilu dan panitia KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu, masalah yang terlihat juga menyangkut literasi atau pengetahuan politik para pemuda pemudi di Kelurahan Sesetan. Sebagai daerah urban di tengah pusat kota, kelurahan Sesetan, pemuda pemudinya merupakan generasi muda yang fasih dalam teknologi. Hampir semua peserta yang hadir dalam pemberdayaan politik ini memiliki *smartphone* dan tidak ada yang *illiterate* atau (tidak bisa membaca dan menulis).

Dalam pemberdayaan pemilih muda ini, dipilih Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Denpasar untuk menjadi mitra pemberdayaan. Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan proses pemilihan umum serta memproses adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum, menjadi mitra yang cocok untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda. Bawaslu memiliki fokus khusus dalam pengawasan, terutama pengawasan partisipatif. Contohnya seperti Forum Warga Pengawasan Pemilu dan GEMPAR (Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu) yang dapat diintegrasikan dengan pemberdayaan politik ini. Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR) adalah sebuah gerakan pengawasan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Forum Warga sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui pendidikan pengawasan Pemilu, diharapkan forum warga memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu (Tim Riset Bawaslu RI, 2017).



**Gambar 2.** Peserta mendengarkan paparan dari mitra Mafindo Bali

Selanjutnya pada tahap ke dua, yakni melaksanakan pemberdayaan melalui pendidikan politik yang diawali dengan *pre test* dan ditutup dengan *post test*. Berikut ini hasil pre-test yang terfokus pada tiga indikator pengetahuan pemilu yang disesuaikan dengan temuan identifikasi masalah pada tahap pertama. Ketiga indikator tersebut terdiri dari; tahu pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada pemilu serentak 2024; memiliki kesadaran mencari informasi tentang pemilihan umum; dan pernah melakukan pengecekan kebenaran informasi ketika mendapat informasi seputar pemilihan umum yang diragukan.

Tabel 1. Hasil Pre Test

Indikator	Pertanyaan	Ya (%)	Tidak (%)
Pengetahuan Pemilu	Responden 'tahu' kapan pemilihan umum kepala daerah di laksanakan pada tahun 2024	57.7	42.3
	Responden pernah mencari tahu informasi mengenai pemilihan kepala daerah di media sosial	50	50
	Responden pernah melakukan pengecekan kebenaran informasi ketika mendapat informasi seputar pemilihan umum yang diragukan	15,4	84,6

Hasilnya terlihat bahwa pada indikator pengetahuan pemilu yang pertama yakni tanggal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, setidaknya terdapat 42.3% responden yang tidak mengetahui kapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut dari total 25 responden. Selanjutnya pada indikator keingintahuan akan informasi mengenai pemilihan kepala daerah tersebar merata dengan 50% responden mengaku mencari tahu, sementara 50% lainnya tidak mencari tahu sama sekali tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di provinsi Bali. Indikator berikutnya yakni pengetahuan responden tentang pengecekan kebenaran informasi ketika mendapat informasi seputar pemilihan umum yang diragukan, hasilnya sekitar 84.6% Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan awal tentang pemilu pada responden yang menjadi target pemberdayaan politik masih cukup rendah untuk pengetahuan dalam pengecekan kebenaran informasi seputar hoaks pemilu. Berangkat dari hasil *pre-test* ini dilaksanakan pemberdayaan politik yang terfokus pada; Pentingnya pengawasan pemilihan kepala daerah, Apa dan siapa yang diawasi, apa penyebab partisipasi politik rendah, Cara anak muda cegah hoaks politik.

Pada fokus pertama, pentingnya pengawasan pemilihan kepala daerah dilakukan karena banyaknya bentuk-bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pemilu baik yang dilakukan oleh Peserta pemilu, pendukung/simpatian calon, bahkan penyelenggara Pemilihan hingga saat ini mengharuskan diawasinya pelaksanaan pemilihan agar terwujud pemilihan yang berkualitas sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Tahapan dan sub pemilihan menjadi hal yang patut diawasi. Sementara aktor yang harus diawasi yakni KPU dan jajarannya, lalu pemerintah, ada pula peserta pemilihan (seperti kandidat politik dan partai politik) dan tentunya masyarakat pemilih itu sendiri. Strategi yang digunakan yakni Forum Warga Pengawasan Pemilu dan GEMPAR (Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu) yang dapat diintegrasikan dengan pemberdayaan politik ini. Selanjutnya penyebab partisipasi politik yang rendah menurut mitra Bawaslu Kota Denpasar terdiri dari rendahnya pendidikan politik dan minimnya kesadaran politik untuk berpartisipasi. Selanjutnya, menurut mitra dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo mengatakan bahwa anak muda atau dalam pengabdian ini merujuk pada pemilih muda dapat mencegah hoaks politik dengan cara; bersikap, bernalar kritis dan tentunya kreatif. Pemilih muda dapat mencegah hoaks politik dengan melakukan strategi berikut ini;

**Debunking** adalah upaya melakukan verifikasi informasi yang salah, atau yang biasa disebut juga dengan periksa fakta.

**Prebunking** adalah upaya membongkar membongkar informasi yang salah sebagai upaya pencegahan atau sebelum hoaksnya beredar.

Selain itu, pemilih muda juga dapat melakukan pemeriksaan fakta melalui Chatbot WhatsApp yang secara otomatis akan menjawab pertanyaan dengan menyimpan nomor berikut ini 0859-2160-0500.



**Gambar 3.** Peserta mendengarkan paparan dari Mitra Bawaslu Kota Denpasar

Setelah dilaksanakan pemberdayaan politik yang terfokus pada 4 (empat) bagian ini, yakni pentingnya pengawasan pemilihan kepala daerah; apa dan siapa yang diawasi?; apa penyebab partisipasi politik rendah? Hingga cara anak muda mencegah hoaks politik dilaksanakan *post test* yang menunjukkan hasil seperti berikut ;

**Tabel 2.** Hasil Post Test

Indikator	Pertanyaan	Ya (%)	Tidak (%)
Pengetahuan Pemilu	Responden 'tahu' kapan pemilihan umum kepala daerah di laksanakan pada tahun 2024	100	0
	Responden pernah mencari tahu informasi mengenai pemilihan kepala daerah di media sosial	100	0
	Responden pernah melakukan pengecekan kebenaran informasi ketika mendapat informasi seputar pemilihan umum yang diragukan	100	0

Pada tabel 2 terlihat bahwa para peserta atau seluruh responden mengalami peningkatan pengetahuan tentang pemilihan kepala daerah. Hasilnya terlihat bahwa pada indikator pengetahuan pemilu yang pertama yakni tanggal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, setidaknya dari 42.3% responden yang tidak mengetahui kapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut berubah menjadi 100% setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Selanjutnya pada indikator keingintahuan akan informasi mengenai pemilihan kepala daerah berubah menjadi 100% responden mengaku mencari tahu tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di provinsi Bali. Indikator berikutnya yakni pengetahuan responden tentang pengecekan kebenaran informasi ketika mendapat informasi seputar pemilihan umum yang diragukan dari sebelumnya berada pada angka 84.6% yang tidak melakukan pengecekan kebenaran informasi, paska acara pengabdian ini berubah menjadi 100% ketika ditanyakan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan dari hasil pengukuran indikator pengetahuan pemilu pada

*pre-test* menjadi meningkat 100% pada hasil *post test* untuk seluruh responden yang hadir pada kegiatan pengabdian ini.

## SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi dua masalah utama yang telah diidentifikasi, yaitu rendahnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepemiluan seperti menjadi pengawas pemilu, serta minimnya pengetahuan politik tentang membedakan hoaks politik yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan seperti meningkatkan kesadaran partisipasi dalam kegiatan kepemiluan melalui edukasi politik di tingkat sekolah dan Perguruan Tinggi. Diperlukan adanya integrasi materi tentang pentingnya partisipasi politik dalam kurikulum pendidikan, terutama di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Integrasi dapat berupa modul pembelajaran khusus atau kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pemahaman tentang proses demokrasi, peran pemilu, dan tanggung jawab warga negara. Selain itu dapat memanfaatkan platform media sosial untuk menjalankan kampanye yang mengedukasi dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu.

Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan politik dalam membedakan hoaks pemilu dapat ditempuh lewat pendidikan literasi digital dengan cara mengomplementasikan program literasi digital yang berfokus pada kemampuan untuk memverifikasi informasi secara online. Sebaiknya ajarkan kepada pemilih muda cara mengenali sumber informasi yang kredibel dan membedakan berita yang valid dari hoaks, terutama terkait dengan pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu juga dapat bekerja sama dengan platform media, terutama media sosial, untuk mengembangkan fitur atau kampanye yang membantu pengguna dalam memverifikasi informasi. Misalnya, label peringatan atau tautan ke sumber resmi untuk berita yang diragukan kebenarannya. Selain itu untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dapat melibatkan komunitas lokal dalam upaya penyebaran informasi yang benar terkait pemilu dan melawan hoaks. Harapannya dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin komunitas, informasi ini dapat diterima dengan lebih baik oleh warga lokal. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda, dapat meningkat, sehingga mereka lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemilu di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Z., Thamrin, U., & Santosa, R. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 202-216. DOI: <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.712>
- BPS. (2022). *Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19: Hasil Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, RI.
- BPS RI. (2023). *Denpasar Selatan dalam Angka 2023*. Denpasar: BPS RI.
- Datareportal. (2023). *DIGITAL 2023 IN INDONESIA*. Retrieved from Data Reportal: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- Dommet, K., & Temple, L. (2018). Digital Campaigning: The Rise of Facebook and Satellite Campaigns. In C. L.-B.-H. Jonathan Tonge, *BRITAIN VOTES 2017* (pp. 189-202). Oxford: Oxford University Press.
- Fikri, S., Nabilah, I. F., Sari, I. S. W., & Siregar, T. F. (2022). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 78-86. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.309>
- Giyandri, T. F., & Sinaga, J. B. B. (2024). Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 371-378. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1919>

- Gutierrez, L. (1995). Understanding the empowerment process: Does consciousness make a difference? *Social Work Research*, 19(4), 229-237. <https://doi.org/10.1093/swr/19.4.229>
- Haryani, T., & Hadi, S. (2021). PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA MEKAR JAYA. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 3(2), 107-117. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v3i2.45>
- Jocelyn A. J., E. (2004). *Voting and Voters: An Introduction*. London: SAGE Publications.
- Kompas. (2019). *Kaum Muda Hadapi Ruang Sempit Politik*. Jakarta: Kompas
- Matthes, J. (2022). Social Media and the Political Engagement of Young Adults: Between Mobilization and Distraction. *Online Media Glob. Communication*, 1(1), 6-22. <https://doi.org/10.1515/omgc-2022-0006>
- Parker, K., & Igielnik, R. (2020). *On the Cusp of Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We Know About Gen Z So Far*. Washington: Pew Research Center.
- Potter, J. W. (2001). *Media Literacy second edition*. California: Sage Publications.
- Potter, J. W. (2004). Argument for the Need for a Cognitive Theory of Media Literacy. *American Behavioral Scientist*, 266-272. <https://doi.org/10.1177/0002764204267274>
- Pratama, A. (2017). *Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016 Terbesar di Dunia*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. Di <https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016>
- Rista, D., & Wiranata, I. H. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi yang Inklusif Melalui Pemberdayaan Warga Negara menuju Masyarakat yang Demokratis. In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)* (Vol. 7, pp. 1216-1227). <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semdikjar/article/view/5318>
- Rogers, E. M., & D., S. J. (1987). *Communication Campaign*. New Burry Park: Sage.
- Sima, A. P. P., & Kusuma, P. S. A. J. (2024). PETUNJUK CERDAS DAN BATASAN ETIKA: BERPARTISIPASI AKTIF DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM PEMILU MELALUI INSTAGRAM. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 149-158. DOI: <https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v6i1.7696>
- Telaumbanua, J. J. P. (2023). KETERLIBATAN PEMUDA DALAM POLITIK: DINAMIKA DAN TANTANGAN. *literacy notes*, 1(2). <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/67>
- Tim Riset Bawaslu RI. (2017). *Panduan Pengawasan Partisipatif*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu RI.
- Yates, S. (2016). *Why People Believe it and What Can Be Done to Counter it*. Liverpool, UK: John Moores University.